

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah *good governance* kini mulai menjadi sorotan di kalangan pemerintah Indonesia. Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Istilah baik disini dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam *good governance*. Salah satu yang menjadi prinsip dasar dalam *good governance* menurut Ulum (2008:40) adalah transparansi dan akuntabilitas.

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) menyatakan bahwa transparansi merupakan sesuatu yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) (Mardiasmo, 2009:20). Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain karena dalam proses pelaksanaan akuntabilitas diperlukan adanya sebuah transparansi.

Salah satu cara masyarakat untuk dapat mengetahui adanya transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan adalah dengan melihat tersedia atau tidak tersedianya akses dalam melihat dan membaca informasi keuangan (laporan keuangan) pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini menjadi isu

yang mulai diperhatikan oleh para pemangku kepentingan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (baik pusat maupun daerah). Menurut Hehanussa (2015) menyatakan bahwa salah satu prasyarat dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat pemangku kepentingan atau lebih khususnya masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam teori keagenan bisa dijadikan sebuah solusi untuk mengatasi adanya *agency problem* dalam sektor pemerintahan yang terjadi antara pemerintah sebagai "*agent*" dan masyarakat sebagai "*principal*". Di Indonesia, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung membuat pemerintah daerah sebagai *agent* dalam melaksanakan pemerintahannya, sedangkan *stakeholder* utamanya (*principal*) adalah masyarakat. Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah harus tersedia bagi masyarakat termasuk laporan keuangan, terlebih bagi pemerintah daerah. Pemerintahan di Indonesia telah melakukan usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang Perundang-undangan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

Informasi mengenai transparansi keuangan pemerintah dapat diketahui ataupun diakses oleh masyarakat melalui *website* resmi masing-masing instansi

pemerintah. *Website* yang dimiliki masing-masing pemerintah merupakan sebuah wadah untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Adanya *website* ini merupakan akibat dari adanya kebijakan penerapan *e-government* yang tertuang dalam bentuk Intruksi Presiden No. 03 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Inpres tersebut menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun *website* resmi masing-masing dalam upaya untuk memperkenalkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga mampu mewujudkan *good governance*. Adanya internet dapat mempermudah publik dalam mengakses laman *website* masing-masing pemerintah daerah maupun pusat. Menurut Trisnawati dan Achmad (2014) menyatakan bahwa internet dapat digunakan untuk melakukan publikasi/pengungkapan laporan keuangan agar lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Pengungkapan atau penyajian laporan keuangan melalui *website* resmi untuk pemerintah daerah biasa dikenal dengan istilah *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR).

Menurut Alhajjriana, dkk (2017) menyatakan bahwa pelaporan keuangan melalui internet (IFLGR) merupakan salah satu cara pemda agar terlegetimasi. Dapat diartikan bahwa dengan adanya praktik IFLGR di pemda mampu menyakinkan *stakeholder* mengenai kinerja pemda pada periode tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping terlegetimasi, adanya praktik IFLGR, pemda bisa menggunakannya sebagai sarana untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat agar terus mendukung jalannya pemerintahan secara optimal.

Internet Financial Reporting Local Government (IFLGR) melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek dari *value of money* atau 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) dalam menyediakan serta mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua pemangku kepentingan publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat (Verawaty, 2015). Oleh karena itu, IFLGR yang menggunakan internet sebagai medianya adalah sarana yang paling efektif bagi pemerintah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangannya secara *online*.

Pada tahun 2012, untuk memperkuat instruksi presiden No. 03 Tahun 2003, Pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri ini dianjurkan kepada pemerintah daerah agar mempublikasikan atau melakukan pengungkapan secara proaktif 12 dokumen tentang pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat melalui website resminya. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD, Perda tentang APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Laporan Realisasi PPKD, LKPD yang sudah Audit dan Opini atas LKPD.

Meskipun telah dikeluarkan instruksi atas transparansi pengelolaan anggaran daerah pemda, fakta di lapangan masih sedikit dari pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan melalui website resminya. Pernyataan ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada bulan September tahun 2013 lalu yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih

miskin informasi mengenai anggaran pada website resminya. Dalam hasil tersebut, FITRA mengungkapkan bahwa pemda yang memublikasikan informasi anggaran masih di bawah 25% (kompas.com, 2019). Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) yang menyatakan bahwa penerapan IFLGR masih minim dilakukan, hanya 2,85% yang menyediakan keseluruhan komponen dari informasi keuangan daerah pada situs resminya. Sedangkan 97,15% situs-situs Pemda lainnya belum mempublikasikan seluruh informasi keuangannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pemda dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan pada website resminya.

Salah satu indikasi yang menjadi faktor pemerintah tidak mewujudkan transparansi pada laporan keuangannya adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah. Menurut data yang dilaporkan pada *Corruption Preceptions Index 2018* oleh *Transparency International* bahwa Indonesia mendapat nilai 38 dari 100 poin dan menempati peringkat 89 dari 180 negara (transparency.org, 2019). Hal tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia masih belum terbebas dari tindakan korupsi. Korupsi dapat terjadi pada semua instansi pemerintah, tak terkecuali pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia, kini berjumlah 514 pemda dengan rincian yaitu 415 pemkab, 93 pemkot dan 6 daerah kabupaten/kota administrasi (wikipedia.org, 2019). Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa pemda yang masih tidak lepas dari tindak pidana korupsi. Salah satu kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah adalah pemotongan penganggaran dana hibah pada 21 yayasan yang terjadi pada pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Sekda,

Kabag Kesra, dan Sekretaris DPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Pemotongan dana hibah yang dilakukan hampir mencapai 90% dari jumlah dana yang dianggarkan (merdeka.com, 2019). Kasus lainnya adalah kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Diketahui Bupati Kotawaringin Timur menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan tersebut belum memenuhi persyaratan yang seharusnya. Dari kasus ini, Bupati Kotawaringin Timur menjadi tersangka korupsi yang diduga merugikan negara Rp 5,8 Triliun (detik.com, 2019). Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa banyaknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah diakibatkan dari lemahnya pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dengan cara mengoptimalkan kegiatan IFLGR agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, IFLGR juga bisa dijadikan sarana untuk pengawasan bagi stakeholders agar kinerja yang dilakukan oleh Pemda lebih terjamin serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui internet telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian yang telah dilakukan masih belum memperoleh hasil yang konsisten. Tingkat kemandirian pemda dapat diartikan kemampuan pemda dalam mengelola pemerintahannya sendiri tanpa bergantung dari dana pemerintah pusat. Prabowo (2016) menemukan bahwa tingkat kemandirian dalam suatu pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan melalui internet

(IFLGR), sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian suatu pemda maka semakin besar tingkat pengungkapan IFLGR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2016) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap IFLGR.

Usia pemda dapat diartikan seberapa lama pemda tersebut telah berdiri atau dihitung sejak daerah tersebut diresmikan menjadi daerah kabupaten/kota sampai tahun sekarang. Usia pemda dalam penelitian Rosita dan Arifin (2017) menunjukkan bahwa usia Pemda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IFLGR, sehingga semakin tinggi usia pemda maka semakin besar tingkat pengungkapan IFLGR. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2016) menunjukkan bahwa usia Pemda tidak memiliki pengaruh terhadap IFLGR.

Opini audit merupakan hasil pemeriksaan oleh BPK atas kualitas atau kewajaran laporan keuangan pemerintahan pada periode tersebut. Opini audit dalam penelitian Rahim dan Martani (2016) menunjukkan bahwa Opini audit oleh BPK memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan IFLGR. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh negative terhadap tingkat pengungkapan IFLGR. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2016) menunjukkan bahwa tidak hubungan terhadap tingkat pengungkapan IFLGR.

Jumlah penduduk dapat diartikan total penduduk yang tinggal dan menetap di daerah tersebut. Jumlah penduduk dalam penelitian Rahim dan Martani (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk di suatu Pemda memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan IFLGR. Sedangkan,

penelitian yang dilakukan oleh Afryansyah dan Haryanto (2013) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap IFLGR.

Jenis daerah merupakan bentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Jenis daerah dalam penelitian Rahim dan Martani (2016) mengungkapkan bahwa jenis daerah kabupaten atau kota berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) mengungkapkan bahwa jenis daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan IFLGR.

Dari hasil penelitian terdahulu yang serupa masih banyak perbedaan hasil penelitian atau belum mencapai penerimaan variabel secara empiris (general) oleh peneliti sebelumnya. Peneliti berkeinginan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara sukarela melalui internet (*IFLGR*). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2016) yang berjudul "*Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah*". Namun pada penelitian ini peneliti mencoba menambahkan dan menggabungkan beberapa variabel yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga penelitian ini memiliki sepuluh variabel yaitu Kekayaan Pemda, Tingkat Kemandirian Pemda, Usia Pemda, Opini Auditor, Jumlah Temuan oleh BPK, Jumlah Penduduk, Jenis Daerah, *Press Visibillity*, *Intergovernmental Revenue* dan Tingkat Akses Internet.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan terbaru, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Dengan menggunakan periode waktu tiga tahun, peneliti dapat melihat perbandingan pengaruh antar variabel dari tahun pertama dengan tahun selanjutnya, sehingga dapat diketahui tingkat pengungkapan pemda melalui IFLGR dari tahun ke tahun. Keuntungan penggunaa periode yang lebih panjang adalah hasil penelitian yang didapatkan dapat digeneralisasi atau dapat dijadikan kesimpulan secara umum. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2015 dikarenakan Indonesia pada tahun tersebut mengalami kenaikan yang pesat dalam penggunaan komunikasi data atau internet. Hal ini didukung oleh survey yang dilakukan oleh APJII mengenai pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dimana pada tahun 2014 terdapat 88,1 juta pengguna internet dan pada tahun 2015 melonjak menjadi 110,2 juta pengguna internet.

Kedua, menambahkan 4 variabel yang berbeda, yaitu kekayaan pemda, jumlah temuan audit oleh BPK. *intergovernmental revenue* dan tekanan dari media atau *press visibility*. Penambahan variabel kekayaan pemda dikarenakan hal ini merupakan bukti nyata atas kinerja pemda yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar tingkat kekayaan pemda, maka semakin besar pemantauan dari masyarakat, dan semakin besar pula permintaan informasi yang disediakan pada website untuk mengukur kinerja pemda (Istikomah dan Mutmainah, 2017). Oleh karena itu pemda akan mengungkapkan laporan keuangannya di website resminya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jumlah kekayaan yang dimilikinya. Variabel jumlah temuan audit oleh BPK digunakan dalam penelitian karena hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan oleh pemda untuk mengungkapkan laporan

keuangannya secara sukarela melalui internet. Semakin kecil jumlah temuan audit yang didapat oleh pemda maka semakin besar peluang untuk pemda termotivasi dalam mengungkapkan laporan keuangannya.

Penggunaan variabel *intergovernmental revenue* dikarenakan hal ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengungkapan laporan keuangan melalui internet bisa dijadikan sebuah solusi untuk menciptakan suasana pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penambahan variabel *press visibility* karena pemerintah daerah yang memiliki tekanan dari media yang lebih besar akan mengeksplorasi penggunaan beberapa saluran untuk pelaporan, termasuk internet, untuk menyebarkan informasi keuangan yang dijabarkan oleh orang-orang mereka sendiri (Laswad, dkk 2005).

Peneliti tidak menggunakan variabel kompetisi politik dikarenakan penelitian mengenai pengaruh kompetisi politik dengan pengungkapan laporan keuangan pemda melalui internet, hasil penelitiannya selalu konsisten yaitu tidak berpengaruh positif terhadap IFLGR, seperti penelitian yang dilakukan oleh Laswad, dkk (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013) dan Rahim dan Martani (2016). Variabel kemampuan keuangan daerah tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan hasil dari penelitiannya selalu konsisten yaitu berpengaruh positif terhadap IFLGR, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alt, dkk (2006), Guillamon, dkk (2001) dan Martani, dkk (2013). Peneliti juga tidak menggunakan variabel tingkat pengangguran dikarenakan

hasil penelitiannya selalu konsisten terhadap IFLGR yaitu tidak berpengaruh, seperti penelitian yang dilakukan oleh Garcia-Sanchez, dkk (2013), Martani, dkk (2013) dan Rahim dan Martani (2016). Sedangkan variabel tingkat kesejahteraan penduduk tidak digunakan dalam penelitian ini karena hasil penelitiannya selalu konsisten yaitu berpengaruh positif terhadap IFLGR, seperti penelitian yang dilakukan oleh Style dan Tennyson (2007), Martani, dkk (2013) dan Rahim dan Martani (2016).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemda, *Press Visibility*, *Intergovernmental Revenue* dan Tingkat Akses Internet Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Melalui Internet”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kekayaan pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
2. Apakah tingkat kemandirian Pemda mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
3. Apakah usia pemda mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
4. Apakah opini audit mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?

5. Apakah jumlah temuan oleh BPK mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
6. Apakah jumlah penduduk daerah tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
7. Apakah jenis daerah mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
8. Apakah *press visibility* mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
9. Apakah *intergovernmental revenue* mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?
10. Apakah Tingkat Akses Internet mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif dari variabel-variabel independen yang diuji, yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kemandirian pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh usia pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini auditor terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah temuan oleh BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah penduduk daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
7. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jenis daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
8. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *press visibility* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
9. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
10. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat akses internet terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan atau pengetahuan serta informasi pendukung (referensi) atau dasar penelitian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang juga mengambil tema pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
2. Bagi pemda, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah mengenai kinerja terutama transparansi dan akuntabilitas publik dalam upaya menciptakan *good governance* melalui pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara sukarela melalui internet. Serta memberikan sebuah masukan untuk membentuk regulasi mengenai *Internet financial local government reporting* yang lebih mengikat.
3. Bagi *stakeholder* pemda, penelitian ini diharapkan menjadi suatu cara untuk dapat mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Serta memberikan motivasi bagi para *stakeholder* untuk saling bekerja sama dengan pemda dalam mewujudkan *good governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas telaah pustaka yang memuat landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, keterbatasan, serta saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.